

EVALUASI KAMPUNG UNGGULAN DIKELURAHAN TENGGILIS MEJOYO KECAMATAN TENGGILIS MEJOYO KOTA SURABAYA

Vidya Rahma Kurniawati
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Correspondence

Email: Vidarahma11@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 11 June 2024

Accepted: 20 June 2024

Published: 21 June 2024

ABSTRAK

The evaluation program was carried out to assess the performance of Surabaya city government policies based on William N Dunn's theory which has 6 indicators. Effectiveness relates to the success of operations in the public sector which has a major impact on public services. Efficiency involves the proper use of time and resources. Adequacy shows the extent to which people's needs are met. Equity relates to the fair distribution of benefits. Responsiveness is important in meeting the needs of benefited groups. Appropriateness refers to the program's goals and underlying assumptions. The evaluation was carried out to improve the welfare of the community in the Tenggilis Mejoyo sub-district by taking into account the desires, needs, hopes and demands of the community. Maximizing the duties and functions of program organizers is important for improving service quality and communicating with the community to convey hopes and demands to local governments.

Keyword: Evaluasi, Kebijakan, Program

PENDAHULUAN

Latar Belakang

UMKM di Indonesia didefinisikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Usaha yang berhasil dijalankan oleh perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi standar yang ditetapkan dalam Undang-undang untuk digolongkan sebagai usaha mikro didefinisikan sebagai usaha mikro berdasarkan Pasal 1 Undang-undang. Usaha menguntungkan yang sesuai dengan definisi hukum usaha kecil adalah usaha yang dijalankan oleh perorangan, perusahaan publik, atau sebagai anak perusahaan atau bukan anak perusahaan dari usaha menengah atau besar. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Republik Indonesia).

Pasal 6 undang-undang ini mendefinisikan UMKM sebagai UMKM yang memenuhi salah satu dari dua persyaratan berikut: hasil penjualan tahunan atau kekayaan bersih atau nilai aset, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat perusahaan berada. Menggunakan standar berikutnya.

Tabel 1.1 kriteria untuk mendefinisikan UMKM

Jenis Usaha	Aset/ Kepemilikan	Jumlah Penghasilan	Pekerja Yang dimiliki
Usaha Mikro	50 jt tidak termasuk tanah dan bangunan	300jt / bln	4 orang
Usaha Kecil	100jt tidak termasuk tanah dan bangunan	300jt lebih hingga 500jt /bln	5-19 orang
Usaha Menengah	500jt – 100 milyar	2.5 milyar – 50 milyar / thn	20-99 orang

Sumber : Undang-undang no 20 thn 2008

Pengenalan tiga elemen kebijakan utama di sektor perekonomian merupakan bagian dari program pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, yang terkait langsung dengan UKM. Langkah pertama adalah meningkatkan layanan keuangan, khususnya bagi UKM. Hal ini mencakup perbaikan pada perbankan, pasar modal, asuransi, dan layanan multifinance.

Untuk mencapai pemerataan pembangunan melalui peningkatan pendapatan dan tingkat lapangan kerja, kebijakan pemerintah untuk mengembangkan sektor UKM adalah dengan mendorong potensi dan keterlibatan aktif UKM dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan perekonomian. Senada dengan Abdul Rosid (2004: 1), “Tujuan pengembangan usaha kecil adalah mewujudkan usaha yang lebih tangguh, mandiri dan menambah jumlah usaha kecil agar para pelaku ekonomi dapat berpartisipasi dalam perekonomian dalam negeri, meningkatkan daya saing usaha kecil. pengusaha dalam negeri di pasar internasional, dan menjaga keseimbangan distribusi investasi antar kelompok dan sektor.(Yunida 2017)

Berdasarkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkopukm), jumlah unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia tercatat sebanyak 64,2 juta pada tahun 2021. Selain itu, sektor masyarakat kecil menyumbang a porsi penyerapan tenaga kerja yang cukup besar—hingga 97 persen. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat 67 juta pelaku usaha yang merupakan UMKM. Berdasarkan penegasan tersebut, UMKM berpengaruh signifikan terhadap perekonomian diIndonesia.



Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Umkm

Sumber : Kemenkop dan Ukm,2021:07

Terdapat 29.507 usaha UMKM di Surabaya. Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan UMKM, salah satu instansi pemerintah tersebut adalah Dinas Koperasi Kota Surabaya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Memahami peran Departemen Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam program pengembangan kebijakan yang telah atau akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan ini sangat penting untuk memaksimalkan kinerja dan pertumbuhan usaha kecil. Akan sangat menarik bagi penulis untuk menyelidiki lebih jauh bagaimana dan apa peran pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perdagangan dalam pemberdayaan masyarakat. (Ningrum, Widiyanto, and Yuliyanti 2018)

Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan arahan kegiatan sosial, pemerintah juga mempunyai hak untuk membuat undang-undang yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Indikator Wahyu Hati & Irawati (2017) dukungan modal dan pendanaan, program pembangunan pemerintah, pembentukan aturan dan regulasi, serta penyediaan informasi—digunakan untuk mengukur faktor kebijakan pemerintah Surabaya. UMKM di Surabaya menghadapi sejumlah kesulitan, seperti terbatasnya pengetahuan dan keterampilan, akses terhadap permodalan, pemasaran dan promosi, infrastruktur dan teknologi, aturan dan birokrasi, serta infrastruktur dan teknologi. Oleh karena itu, untuk memperkuat sektor UMKM sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi, diperlukan kerja sama dan peran serta berbagai pihak terkait. (Said 2015)

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya yang menerbitkan Peraturan Wali Kota Surabaya tentang Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya, bertanggung jawab terhadap tumbuhnya UMKM di Kota Surabaya. “Pemberdayaan merupakan upaya Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam menciptakan iklim dan pengembangan usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri,” menyebutkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro pada pasal 1 ayat 10. Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Surabaya, serta Peraturan Daerah Perkembangan Kota Surabaya Tahun 2015. Walikota. (1 RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur | 2023 2023)

Tujuan dari program pengembangan UMKM Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya yang berbasis pada Program Desa Unggulan ini adalah untuk memenuhi tujuan Walikota Surabaya Ibu Tri Rismaharini. Hal ini dilakukan melalui Pemerintah Kota Surabaya. Tujuan dari pengembangan UKM berbasis Program Desa Unggulan ini adalah agar pelaku usaha kecil dapat tumbuh melalui perseorangan kecil, sehingga mewujudkan perluasan perekonomian Surabaya. (Rizky Nandya Bayualdi 2017)

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya telah membentuk sebelas komunitas unggulan. Sejak tahun 2010, Program Desa Unggulan yang berfungsi sebagai hub bagi UMKM telah digunakan untuk melaksanakan pengembangan UMKM. Bantuan yang diberikan berupa penyelenggaraan kegiatan pengembangan UMKM di desa binaan.

Kampung unggulan perlu dievaluasi, maka kampung unggulan dijadikan sebagai objek penelitian. Kampung unggulan merupakan sebuah desa kecil yang banyak masyarakatnya yang menciptakan barang-barang tersebut untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Pengrajin tempe dapat memperluas usahanya melalui kemajuan dalam pengolahan produk; Jika UMKM mendapat arahan, mereka bisa berekspansi lebih dari sekadar memproduksi tempe. (Armanu et al. 2023)

Tujuan dari peninjauan tersebut adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kampung Unggulan, khususnya di Kecamatan Tenggilis Mejoyo. Masyarakat harus memperhatikan kebutuhan, keinginan, harapan, dan tuntutan masyarakat jika ingin mempunyai

pendapatan yang stabil dan meningkatkan taraf hidupnya. Selain itu, penting bagi penyelenggara program untuk memaksimalkan peran dan tanggung jawabnya karena pejabat daerah mempunyai peranan penting dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, mereka harus meningkatkan standar layanan dan membangun ikatan yang lebih kuat dengan masyarakat agar lebih memahami kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta mengkomunikasikannya kepada pemerintah daerah. tingkat kota atau kabupaten. (Fika et al. 2023)

METODE

Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif dapat memberikan deskripsi dan gambaran pada Program yang akan penulis teliti dengan judul Evaluasi program kampung unggulan, untuk memastikan kualitas Program kampung unggulan dari proses penelitian. (Friadi 2014).

Fokus Penelitian

Untuk melakukan evaluasi program secara menyeluruh terhadap suatu program dalam seluruh dimensinya, penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn dengan teknik kualitatif, yang membantu membatasi objek penelitian yang diangkat. Fakta bahwa para peneliti tidak terhambat oleh banyaknya data yang dikumpulkan di lapangan merupakan keuntungan lain. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi penyelidikan kualitatif dan membatasi penelitian pada mengidentifikasi fakta mana yang berguna dan mana yang tidak relevan dengan mengarahkan penekanan peneliti pada tingkat kebaruan informasi yang akan dikumpulkan dari kondisi ekonomi dan sosial. Indikator keberhasilan pembangunan dengan kemampuan, nilai, dan dukungan menjadi penekanan utama penelitian ini. Pembelajaran. (Alghazali 2019) Dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian adalah

1. Mensukseskan Program Desa Unggulan Desa Tenggilis Mejoyo. Efektivitas pada dasarnya berkorelasi dengan tingkat keberhasilan operasi sektor publik. Oleh karena itu, suatu kegiatan dianggap efektif jika berdampak signifikan terhadap kapasitas penyampaian layanan masyarakat, yang merupakan tujuan yang telah ditentukan.
2. Efektivitas penerapan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya. Efisiensi didefinisikan sebagai kuantitas sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari kegiatan yang dilaksanakan, dan mengacu pada apakah program desa unggulan berjalan sesuai dengan rencana pemerintah.
3. Konsep kelayakan dalam pelaksanaan Program Desa Unggulan mengacu pada sejauh mana
4. Perataan dalam Melaksanakan Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pelayanan public yang adil dan merata.
5. Sosial Di Desa Tenggilis Mejoyo, respon Program Desa Unggulan terhadap kebijakan pemerintah mengacu pada seberapa baik suatu kebijakan memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok sosial tertentu. Kriteria daya tanggap sangat penting karena tanpa mempertimbangkan kebutuhan nyata kelompok yang seharusnya dibantu oleh suatu kebijakan, analisis yang memenuhi semua kriteria lainnya—efektivitas, efisiensi, kesesuaian, dan kesetaraan—akan tetap gagal.

6. Ketepatan pelaksanaan Program Desa Unggulan Desa Tenggilis Mejoyo. Kesesuaian dan rasionalitas substantif berkaitan karena pertanyaan apakah suatu kebijakan cocok mempertimbangkan dua kriteria atau lebih secara kolektif, bukan kriteria individual. Istilah “kesesuaian” menggambarkan signifikansi atau nilai tujuan program dan tujuan program

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan temlat penelitian, mencari data dan juga informasi terkait. Lokasi penelitian tersebut berada di Dinas Perdagangan kota Surabaya yang beralamat di Jalan Tunjungan no 1-3, Genteng, Kec Genteng, Surabaya. Lokasi kedua adalah Kecamatan Tenggilis Mejoyo. Lokasi ketiga adalah kelurahan Tenggilis Mejoyo, dan lokasi keempat adalah Kampung Unggulan Tenggilis Mejoyo Surabaya. Penulis memilih beberapa tempat tersebut karena tempat tersebut merupakan sumber data, Penanggung jawab dan pelaksanaan Program kampung unggulan yang berada di kota Surabaya sejalan dengan judul penelitian yang diangkat oleh penulis mengenai Evaluasi Program kampung unggulan di kecamatan tenggilis kelurahan tenggilis mejoyo kota Surabaya.

HASIL PENELITIAN

Temuan observasi, wawancara, dan telaah pustaka terkait penilaian program kampung unggul di Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya dirinci pada bab hasil penelitian dan pembahasan. Untuk memastikan status program wali kota pertama tahun 2021 di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, dilakukan kajian evaluasi terhadap program desa unggulan.

Sebuah organisasi pemerintah, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya berperan dalam mengatasi dan menyelesaikan permasalahan koperasi yang muncul di lingkungan sekitar dalam upaya memajukan kesejahteraan masyarakat Surabaya. Jasa

DISKUSI

Efektifitas

Berdasarkan dari data yang peneliti temukan melalui pernyataan yang ibu Rizki Febriyanti selaku Dinkopdag diadakan program ini adalah untuk membantu UMKM yang pernyataan itu juga di katakan oleh Bu Henny selaku Dinkopdag mengatakan kebijakan tersebut bertujuan untuk membantu berkembangnya UMKM yang diharapkan oleh dinas yang terutama untuk memajukan perekonomian kota Surabaya pernyataan tersebut dibenarkan oleh para pelaku UMKM bahwasanya dinas melakukan tugasnya membantu menjalankan program ini sesuai kebijakan dapat dilihat dari tabel tujuan pelayanan dinas untuk masyarakat di kota Surabaya..

Bentuk kebijakan pemberdayaan UMKM yang ditemukan oleh peneliti merupakan sumber data untuk mengetahui apakah program yang ditawarkan oleh dinas mengenai bantuan bantuan atau program pemberdayaan UMKM sudah sesuai dengan kebijakan atau belum peneliti melakukan wawancara kepada ibu Rizki Febriyanti selaku Dinkopdag kota Surabaya yang menyatakan bahwa program yang dijalankan sudah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kota untuk memberdayakan UMKM di Tenggilis Mejoyo pernyataan yang juga dibenarkan oleh Bu Henny selaku Dinkopdag Kota Surabaya yang menyatakan bahwa sudah dilaksanakan sesuai kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah kota Surabaya hal tersebut dibenarkan oleh para pelaku UMKM selaku penerima Pelatihan, Pembinaan dan Bantuan pendanaan program. Mereka mengatakan bahwa Dinas sudah melakukan programnya sesuai dengan peraturan, mereka juga dibantu selama ini dan

mereka merasa terbantu dengan adanya program pemberdayaan yang ditawarkan oleh dinas kepada para pelaku UMKM di Tenggilis mejoyo.

Efisiensi

Data tersebut diperkuat dengan pernyataan yang di katakan oleh Bu Rizki Febriyanti yang menyatakan bahwa perkembangan ini banyak instansi yang membantu salah satunya Bay yang tugasnya adalah memberikan bantuan dana untuk peralatan permodalan dan ibu ini juga menyatakan bahwa instansi instansi ikut serta dalam menjalankan program selain dinas dan masyarakat masyarakat juga membenarkan ada hotel juga menawarkan bantuan seperti pemasaran untuk produk mereka.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori dari (William N. Dunn, 2003) menggunakan indikator efisiensi pemberdayaan UMKM di Tenggilis Mejoyo dapat di katakan sudah berjalan secara optimal di karenakan instansi instansi tersebut memberikan bantuan untuk usaha pelaku UMKM. Pihak pemerintah yaitu dinas mengusahakan membuat Nomor induk berusaha NIB.

Berdasarkan dari temuan data mengenai peran masyarakat pada program ini sebagai peserta atau pelaksana kegiatan. Misalnya, penerima bantuan Permodalan dan penerima pelatihan. Masyarakat sebagai pelaksana kegiatan karena mereka penerima bantuan Permodalan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Dinas kepada masyarakat. Pernyataan tersebut juga diungkapkan ibu Henny Dinkopdag mengenai peran masyarakat, mereka penerima bantuan permodalan dan Pelatihan yang diadakan dinas di setiap Kecamatan ibu Henny Dinkopdag. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh para pelaku UMKM. Masyarakat kan pelaku UMKM jadi mereka benar menerima Bantuan Permodalan dan Pelatihan tapi permodalan itu kita mengajukan ke bank bank yang bekerja sama .

Dari beberapa Data temuan yang dianalisis oleh peneliti dapat dikatakan program ini sudah efektif sesuai dengan indikator keberhasilan efektif yang menggunakan teori (Wiliam N Dunn, 2003) dengan kriteria yang sudah melalui proses evaluasi kebijakan mengenai efektivitas yang diharapkan atau mencapai tujuan diadakan tindakan efektivitas sudah cukup efektif mengenai indikator efektif pada program pemberdayaan UMKM di Tenggilis Mejoyo, untuk dinas Agar tetap menjaga kualitas pelayanan dan mengembangkan program program pemberdayaan UMKM di Tenggilismejoyo menjadi lebih baik dan maju.

Kecukupan

Berdasarkan Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di temukan adanya pelaku usaha yang sudah atau belum menerima pembinaan sesuai kebijakan yang dilakukan Dinkopdag berupa pembinaan hal tersebut dapat dibuktikan melalui hasil wawancara peneliti kepada Ibu Riski Febianti selaku Dinkopdag bidang pemberdayaan usaha mikro. Perubahan dari sebelum dan sesudah pelaksanaan pertama program ini pola pikir mereka mau berkerja sama dengan pihak lain dengan tujuan untuk berkembangnya usaha mereka, kedua proses produksi yang awalnya menggunakan kompor minyak sekarang menggunakan kompor gas sesuai arahan atau binaan Dinkopdag sehingga efek dari perubahan kedua dapat mengurangi asap produksi yang mengganggu pernapasan masyarakat sekitar demi kesehatan bersama, ketiga yang awalnya mereka menggunakan tong bekas yang terlihat sangat tidak sehat dan tidak layak digunakan untuk produksi sekarang, mereka mau karna dinas juga mencarikan bantuan-bantuan subsidi karna jika hanya diberikan saran-saran mereka hanya mendengarkan dan tidak mau menggantinya karna harganya relatif cukup mahal kita juga membantu pemasarannya melalui binaan olahan yang terbuat dari tempe yang cukup berkembang .

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Ibu Heni selaku Dinkpdag bidang pemberdayaan usaha mikro menyatakan bahwa, perubahan selama ini adalah dengan adanya

program-program ini mereka jadi memiliki legalitas dan perizinan usaha mempunyai kelayakan sertifikat halal untuk produk makanan mereka juga mampu mengembangkan produk dan varian produk yang beragam pengembangan produk, pengembangan kemasan produk. Mereka juga dapat menyusun keuangan yang baik dan benar, dan adanya pengetahuan adanya produksi pangan yang baik, itu sudah merupakan perubahan yang sangat jauh menurut saya dengan diadakannya program-program Dinkopdag ini. Dengan data yang ditemukan peneliti masyarakat menyatakan, benar adanya bantuan pembuatan NIB disekitar Tenggilis Mejoyo rata – rata pelaku UMKM disini sudah mengantongi Izin Berdagang mbak semua sudah memiliki. Pernyataan tersebut di benarkan oleh pelaku UMKM lainnya, yang sudah memiliki NIB yang proses pembuatannya dibantu oleh dinas.

Kecukupan salah satu faktor penting dalam evaluasi program adalah kecukupan. Salah satunya kecukupan dalam perubahan dari sebelum dan sesudah diadakan program oleh Dinas Koprasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan untuk mengetahui perkembangan dan perubahan secara efektif dan efisien.

Pemerataan

Pemerataan yang dimaksud di sini adalah upaya meningkatkan kualitas usaha di wilayah Tenggilis mejoyo. Untuk mempermudah pemerintah Surabaya memfasilitasi adanya bantuan berupa Pembinaan dan pembuatan surat izin berdagang atau usaha bagi masyarakat. berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti Pembinaan, Pembantuan izin dan Pemasaran yang diberikan kepada masyarakat oleh Pemerintah kota Surabaya. Hal tersebut diperkuat melalui wawancara yang dilakukan peneliti kepada Dinkopdag .Dinas menyatakan pemerataan pada program ini sudah merata. Pernyataan tersebut di ungkapkan pada wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu Riski Febrianti Dinkopdag Kota Surabaya, sudah merata karena dipusatkan seluruh kegiatan di Kecamatan Tenggilis mejoyo, sudah mencakup semua para pelaku UMKM untuk pendampingan dan kegiatan lainnya. Sejalan dengan pernyataan Dinas yang menyatakan bahwa bantuan yang dilakuakn sudah merata hal tersebut juga dikatakan oleh ibu Henny Dinkopdag. Pelatihan pembinaan selalu diinfokan kepada kecamatan lalu diteruskan kepada para UMKM. Dengan adanya berita tersebut msasyarakat membenarkan adanya bantuan dengan merata. Para pelaku UMKM di bantu dan merasa terbantu.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan toori dari (William N Dunn, 2003) menggunakan indikator Pemerataan program Kampung Unggulan di Tenggilis Mejoyo dapat di katakan sudah berjalan optimal di karenakan Pembinaan dan Permodalan yang merata kepada pelaku UMKM di tenggilis mejoyo akan tetapi pemerintah sudah pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan juga terbukti berhasil dalam pelaksanaannya. Pelayanan yang diberikan didistribusikan secara adil dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

Tujuan pemerataan adalah untuk memperluas ketersediaan dan kualitas program secara merata di suatu wilayah tertentu. Yang dimaksud dengan pemerataan dalam konteks ini adalah distribusi peluang dan sumber daya yang adil dan merata di antara para pelaku UMKM di seluruh wilayah peserta program. Untuk mewujudkan kondisi yang setara bagi seluruh pelaku UMKM di suatu daerah, pemerataan pengembangan UMKM menjadi tujuannya. Hal ini dicapai dengan memberikan akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang kepada UMKM di pedesaan dan perkotaan.

Responsifitas

Berdasarkan observasi yang di lakukan peneliti respon masyarakat dalam melakukan pemberdayaan UMKM sangat baik di lihat dari antusias dan semangat warga dalam mengikuti programnya. Respon atau tanggapan masyarakat mengenai pemerintah menunjukkan bahwa

pemerintah memperhatikan pemberdayaan UMKM masyarakat, hal tersebut dapat di lihat dari banyak masyarakat pelaku UMKM di Tenggilis Mejoyo yang sudah merasakan bantuan Permodalan. didalam program ini ada banyak instansi yang membantu salah satunya BI (Bank Indonesia) dan kampus-kampus salah satunya kampus ITS, BI membantu wajah atau cover kampung unggulan ini untuk menjadi kampung wisata yang layak dikunjungi jadi orang bisa berkunjung dan melihat proses produksinya makanan Indonesia dan kampus ITS yang membantu mendatangkan para wisatawan karna adanya program Internasional yang wisatawan mancanegara bisa berkunjung dan bank- bank terkait membantu mengenai permodalan dan kemitraan .Pernyataan tersebut juga dikatakan oleh ibu Henny Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan daerah Tenggilis Mejoyo. Program ini banyak yang membantu dari mulai bank-bank, kampus, dan Hotel sekitar Tenggilis Mejoyo. Bank- bank ikut serta membantu pernyataan dari para pelaku UMKM . bank- bank itu membantu modal usaha yang bunga nya ringan jadi cocok untuk para pelaku usaha kecil. Kemampuan bereaksi atau bereaksi terhadap suatu situasi dengan cepat dan efektif dikenal dengan istilah responsiveness. Penerimaan dalam konteks pemberdayaan UMKM mengacu pada kemampuan untuk bereaksi secara cepat dan tepat terhadap kebutuhan dan kesulitan yang dihadapi UMKM. Kapasitas untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam lingkungan komersial dan pasar merupakan aspek lain dari daya tanggap.

Pemerintah telah membuat program sosialisasi dan pelatihan, namun terkadang masyarakat tidak mengikutinya. Berdasarkan analisis menggunakan teori dari (William N. Dunn, 2003) dengan menggunakan indikator daya tanggap pemberdayaan UMKM di Desa Tenggilis Mejoyo dapat dikatakan sudah berjalan maksimal. Salah satu standar yang diperlukan dalam prosedur penilaian kebijakan publik adalah responsiveness, yang mengacu pada seberapa besar suatu program

Ketepatan

Ketepatan Secara dekat berhubungan pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan kebijakan tersebut, Untuk memperjelas maksud dari ketepatan berita yang di buat oleh pemerintahan kota Surabaya peneliti melakukan wawancara kepada Dinkopdag dan para pelaku UMKM. Sudah sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan dan umkm di Tenggilis sudah mulai berkembang bahkan mereka sudah merambah ke bisnis online yang di bantu Dinas melalui toko Online E Peken dan yang toko Offline SKG (Surabaya Griya Galery) . Sejalan dengan pernyataan ini Dinas juga menyatakan sudah sesuai dan dinas sudah cukup membantu masyarakat terutama para pelaku umkm untuk membantu menaikkan kualitas ekonomi dan berdagang yang sesuai pasaran semua program yang dijalankan gratis tidak dipungut biaya. Pernyataan tersebut juga dikatakan oleh Ibu Henny Dinkopdag Kota Surabaya.

Dinas juga setiap pertemuan mengingatkan untuk segera mengurus izin halal agar bisa berjualan secara luas pemasarannya. Dinas membantu dalam pemasaran yang cukup di jaman sekarang yang melalui Online maupun offline.Pernyataan tersebut di benarkan oleh para pelaku UMKM. Dinas memberi info kepada para pelaku jika ada event atau CFD utuk ikut serta iku memasarkan dagangannya dinas juga membuatkan web untuk berjualan di E Peken sama SKG di siola sama MERR mereka mempermudah para pelaku UMKM.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menemukan beberapa berita yang mendukung pernyataan responden. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya gigih berupaya mempercepat laju pemulihan ekonomi dan menarik minat UMKM, supermarket, dan peserta SWK lainnya di Kota Pahlawan. Hasilnya, para pengusaha bisa memperoleh omzet rata-rata per bulan sebesar Rp 50 juta dengan menggunakan platform e-commerce milik Pemkot, E-Peken Surabaya. Alhasil, sepanjang Januari hingga Juli 2022, E-Peken Surabaya mencatatkan transaksi sebesar

Rp 19,2 miliar. Hal ini menandakan warga Kota Surabaya cukup percaya diri untuk berbisnis di E-Peken Surabaya. Berdasarkan analisis teoritis dan penggunaan indikator akurasi dalam evaluasi kebijakan (William N. Dunn, 2003),

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya maka dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM menggunakan teori dari William Dunn yaitu terdapat 6 indikator efekat efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan maka dapat di katakana kebijakan pemberdayaan UMKM di Tenggilis Mejoyo mengacu pada teori William Dunn.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa efektivitas program ini terbukti cukup tinggi. Program ini mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat dan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di karenakan pelatihan yang di berikan pemerintah untuk usaha pelaku UMKM sudah dilakukan sesuai kebijakan. Pihak pemerintah kota surabaya sudah membantu para UMKM di Tenggilis Mejoyo membuat Nomor induk bersuha (NIB) dan mebantu permodalan melalui Instansi- Instansi yang berkerjasama dengan Dinkopdag kota Surabaya untuk membantu permodalan para UMKM, indikator Kecukupan sudah berjalan secara optimal di karenakan pelatihan dan bantuan pembuatan surat NIB yang di berikan pemerintah sudah merata di berikan kepada pelaku UMKM jadi sudah banyak UMKM yang berkembang karena bantuan yang diberikan oleh pemerintah kota Surabaya dan memiliki surat NIB, indikator Pemerataan sudah berjalan optimal di karenakan pembinaan dan pembantuan surat NIB yang di berikan sudah merata kepada masyarakat pelaku UMKM di Tenggilis Mejoyo yang membuat mereka jadi lebih bisa berkembang dan mampu menciptakan usaha yang layak .

Indikator Ketepatan sudah berjalan secara optimal karena kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah dalam pemberdayaan UMKM sudah tepat sehingga mereka bisa memasarkan produknya ke dalam web E-Peken secara online dan SKG Merr dan Siola yang memiliki kualitas nasional yang dapat dilihat oleh pengguna jejaring sosial dan para wisatawan lokal maupun asing.

Program ini juga terbukti sangat tepat dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Program kampung Unggulan ini terbukti mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat. Diharapkan pemerintah terus membantu perkembangan produk dan pasar agar semua produk dimasyarakat dapat berkembang lebih baik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka memberikan saran terhadap dampak Program Kampung Unggulan di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya terus mempertahankan program kampung unggulan untuk kemajuan ekonomi masyarakat.
2. Diharapkan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dan Perdagangan dapat menjaga kerjasama dengan Instansi-Instansi yang terkait dalam program kampung unggulan ini untuk terus menumbuhkan perekonomian yang baik dan berkualitas bagi masyarakat sekitar Tenggilis Mejoyo
3. Diharapkan masyarakat menggunakan saran ataumasukan yang diberikan Dinas untuk kemajuan ekonomi masyarakat sekitar Tenggilis Mejoyo.

REFRENSI

- “1 RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur | 2023.” 2023. : 1–78.
- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani. 2023. “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif.” *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1(2): 1–9.
- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Surabaya. 2021. “Rencana Strategis Pemerintah Kota Surabaya.” <https://dinkopdag.surabaya.go.id/wp-content/uploads/2022/08/Renstra-2021-2026-Dinkopdag.pdf> (1): 1–169.
- Dr. Dewi Juliah Ratnaningsih, S.Si., M.Si., and S.Si., M.Si. Dr. R. Bagus Fajriya Hakim. 2017. “Prinsip Dasar Penyajian Data.” *Modul 01*: 1–40.
- Fika, Nurul et al. 2023. “Analisis Kebijakan Versi William Dunn Dalam Pondok Pesantren Modern.” *Journal on Education* 05(04): 16737–47.
- Mukhrijal, S, and M Ip. 2022. “EFEKTIVITAS PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN GAMPONG JAWA KECAMATAN KUTA RAJA KOTA BANDA ACEH The Effectiveness Of The Kampung Keluarga Program Plan To Reduce The Poverty Rate
- Perindustrian, Dinas, and D A N Perdagangan. 2015. “Renja 2015.”
- Purwaningsih, Ayu, and Weni Rosdiana. 2018. “Dampak Program Kampung Unggulan Di Kampung Tempe, Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya.” *Publika* 6(4).
- Rijali, Ahmad. 2018. “Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin.” 17(33): 81–95.
- Rizky Nandya Bayualdi, Yonandika. 2017. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Unggulan Di Kota Surabaya (Studi Kasus Kampung Tempe Di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya).” *Publika* 5(2): 1–6.
- Said, Abdul Rauf Alauddin. 2015. “Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas - Luasnya Menurut UUD 1945.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9(4): 505–30. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/613/552>.
- Yunida, E. 2017. “Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini.” : 1–23.